BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Instansi (KPPN Bandung I)

Awal pembentukan KPPN Bandung I dimulai pada tahun 1965 berdasarkan Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1964 Nomor PKN/1/6/4 dan mulai beroperasi pada Januari 1965 dengan nomenklatur pada saat itu yaitu Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.



Gambar 2.1 Gedung KPPN Bandung I

Dalam sejarah perjalanannya sejak Januari 1965 sampai saat ini KPPN Bandung I telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur mulai dengan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, kemudian pada tahun 1968 berubah menjadi

Kantor Bendahara Negara, selanjutnya pada tahun 1975 berubah lagi menjadi Kantor Perbendaharaan Negara dan pada tahun 1990 berubah lagi menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sekaligus memisahkan KPKN Bandung I dan KPKN Bandung II berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 12 Juni 1989 nomor.645/KMK.01/1989.

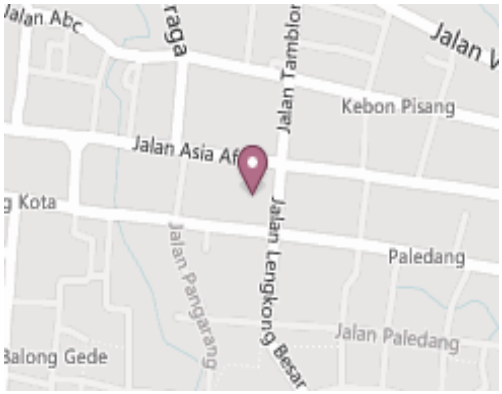
Sejalan dengan pengembangan Organisasi pada Tahun 2002 KPKN Bandung II bergabung dengan KPKN Bandung I dan menjadi KPKN Bandung. Pada tahun 2004 KPKN berubah lagi nomenklaturnya menjadi KPPN Bandung. Kemudian, untuk lebih meningatkan mutu pelayanan kepada masyarakat berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor.214/KMK.01/2005. tanggal 2 Mei 2005 KPPN Bandung pecah menjadi KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II.

2.1.1 Kondisi Geografis

KPPN Bandung I berada di Kota Bandung (107 0 Bujur Timur dan 6 0 55' Lintang Selatan) yang merupakan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Kota Bandung terletak diantara tepat nya di Jalan Asia Afrika No. 114 Gedung Keungan Negara. Lokasi KPPN Bandung I cukup strategis dilihat dari segi komunikasi, perekonomian, keamanan, serta tata letaknya berada di pusat kota Bandung.

Secara topografis Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah utara dengan ketinggian 1.050 meter dan

terendah di Selatan pada 675 meter di atas permukaan laut. Di wilayah Kotamadya Bandung bagian Selatan permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian Utara berbukit-bukit membentuk panorama yang indah.

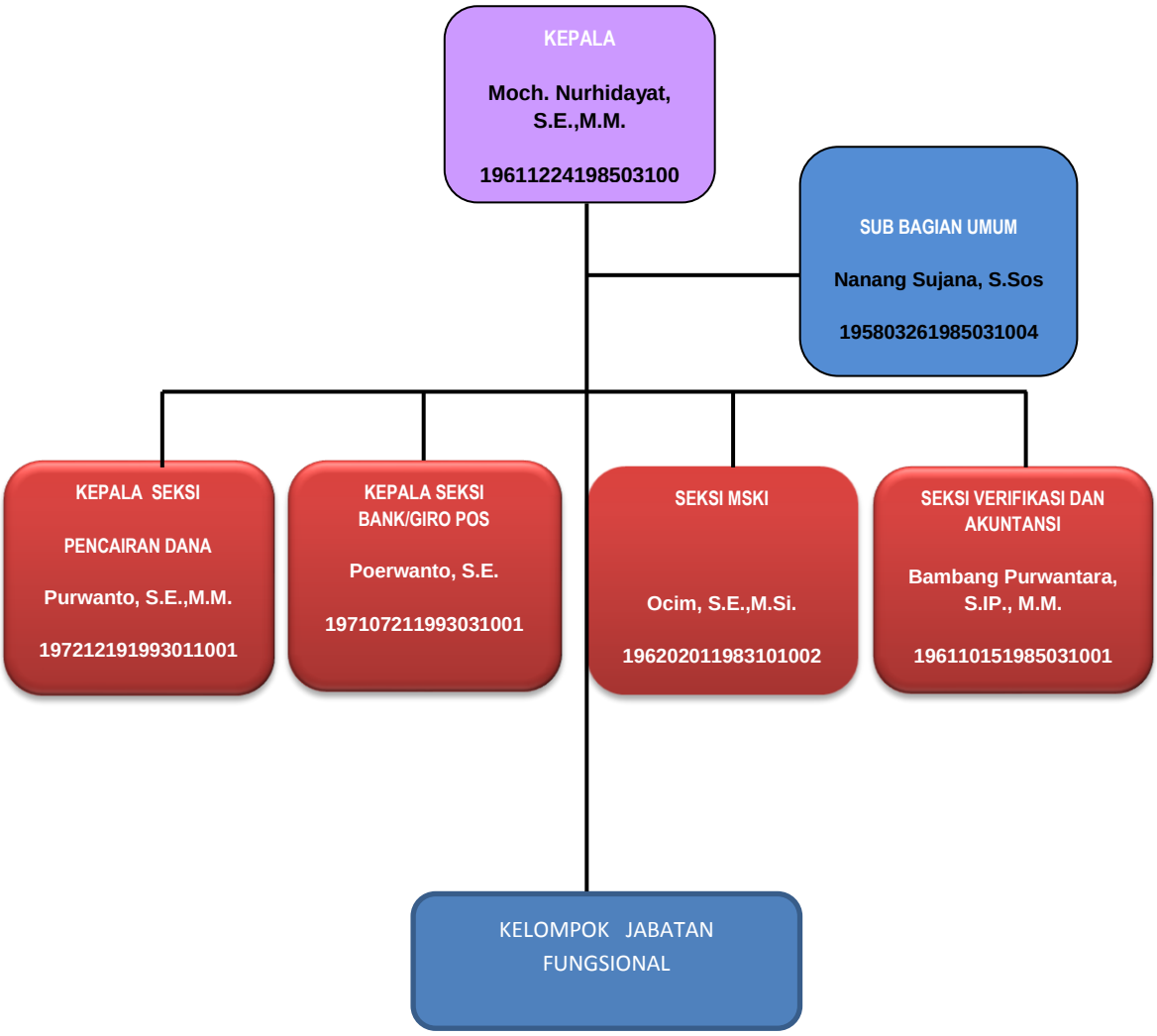


Gambar 2.2 Peta Lokasi

Keadaan geologis dan tanah Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman kwartier dan mempunyai lapisan tanah *alluvial* hasil letusan gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian Utara umumnya merupakan jenis *andosol*, di bagian Selatan serta Timur terdiri atas sebaran jenis *alluvial* kelabu dengan bahan endapan tanah liat. Di bagian Tengah dan Barat tersebar jenis *andosol*. Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk. Pada tahun 1998 temperatur rata-rata 23,5^{o} C, curah hujan rata-rata 200,4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21,3 hari perbulan. Letak geografis dan iklim kota Bandung yang sejuk ini membuat suasana menjadi nyaman bagi semua pegawai KPPN Bandung I untuk bekerja.

2.2 Struktur Organisasi Instansi (KPPN Bandung I)

KPPN Bandung I adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, struktur organisasi disusun sebagai berikut:



Gambar 2.3 Struktur organisasi KPPN Bandung I

2.3 Uraian Tugas Instansi (KPPN Bandung I)

Adapun tugas dan fungsi KPPN Bandung I sendiri adalah sebagai berikut:

TUGAS POKOK	FUNGSI
• Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara • Penyaluran pembiayaan atas beban APBN • Melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-	• Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan; • Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara); • Penyaluran Pembiayaan atas beban APBN; • Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan • Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Negara melalui dan dari Kas Negara; • Pengiriman dan penerimaan kiriman uang; • Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBN; • Penyusunan Laporan Realisasi pembiayaan yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; • Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; • Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan

undangan yang berlaku.

akuntansi

- Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan
- Pelaksanaan kehumasan
- Pelaksanaan administrasi KPPN.

2.3.1 Wilayah dan Mitra Kerja

a. Jumlah Satuan Kerja/Volume Kerja Pengelolaan Administrasi Belanja pegawai dalam dua tahun terakhir, sebagai berikut:

No.	Pemangku Kepentingan	2012	2013	2014
1	Satuan Kerja / SKPD	224	223	221
2	Pengelolaan Kartu Gaji	12.263	12.566	12.769

b. Kewenangan Wilayah Kerja KPPN Bandung I

No	Wilayah	Kode Kewenangan						JUMLAH
		KP	KD	TP	DS	UB	DK	
1.	Provinsi Jawa	2	6	12	-	-	51	71

	Barat							
2.	Kota Bandung	16	90	4	-	-	-	110
3.	Kab. Bandung	1	11	5	-	-	-	17
4.	Kab. Bandung Barat	1	7	4	-	1	-	13
5.	Kota Cimahi	-	7	1	-	-	-	8
6.	Kab. Sumedang	-	2	-	-	-	-	2
JUMLAH		**20**	**123**	**26**	**0**	**1**	**51**	**221**

Tabel 2.1 Kewenangan Wilayah Kerja

2.3.2 Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Bandung I

Wilayah kerja KPPN Bandung I meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi terdiri dari Kementerian sebagai beikut :

1) Badan Pemeriksa Keuangan (Bagian Anggaran 004)
2) Kementerian Dalam Negeri (010)
3) Kementerian Hukum dan HAM (Bagian Anggaran 013)
4) Kementerian Keuangan (Bagian Anggaran 015)
5) Kementerian Pertanian (Bagian Anggaran 018)
6) Kementerian Perindustrian (Bagian Anggaran 019)
7) Kementerian ESDM (Bagian Anggaran 020)
8) KementerianPendidikan dan Kebudayaan (Bagian Anggaran 023)
9) Kementerian Kesehatan (Bagian Anggaran 24)

10) Kementerian Nakertrans (Bagian Anggaran 026)
11) Kementerian Sosial (Bagian Anggaran 027)
12) Kementerian Kehutanan (Bagian Anggaran 029)
13) Kementerian Kelautan dan Perikanan (Bagian Anggaran 032)
14) Kementerian Kebudpar (Bagian Anggaran 040)
15) Kementerian Lingkungan Hidup (Bagian Anggaran 043)
16) Kementerian PPN (Bagian Anggaran 055)
17) Badan Pertanahan Nasional (Bagian Anggaran 056)
18) Perpustakaan Nasional (Bagian Anggaran 057)
19) POLRI (Bagian Anggaran 060)
20) Badan Koordinasi Penanaman Modal (Bagian Anggaran 065)
21) Badan Narkotika Nasional (Bagian Anggaran 066)
22) Komisi Pemilihan Umum (Bagian Anggaran 076)
23) Kementerian Perdagangan (Bagian Anggaran 090)
24) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Bagian Anggaran 092)
25) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (Bagian Anggaran 104)
26) Badan SAR Nasional (Bagian Anggran 107)
27) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Bagian Anggaran 116)
28) Lembaga Penyiaran Publik TVRI (Bagian Anggaran 117)

29) Bendahara Umum Negara (Bagian Anggaran 999)

2.3.3 Institusi Perbankan Mitra Kerja KPPN Bandung I

Mitra kerja KPPN Bandung I dalam penerimaan Negara dari pajak dan bukan pajak terdiri dari 31 bank persepsi/devisa persepsi di kota Bandung meliputi :

NO	BANK PERSEPSI		
	NAMA	KODE BANK	NOMOR REKENING
1	2	3	4
1	PT. Bank BRI (Persero) Tbk.	(210)	
A	BRI Bandung Asia Afrika	(01P)	0005-01-000861-30-5
B	BRI Majalaya	(02P)	0132-01-000101-30-2
C	BRI Cimahi	(03P)	0137-01-000388-30-2
D	BRI Bandung Dewi Sartika	(04P)	0286-01-000010-30-6
E	BRI Bandung Naripan	(05P)	0337-01-000233-30-9
	BRI Bandung Naripan (Devisa)	(05D)	0337-01-000349-30-4

F	BRI AH Nasution	(06P)	0354-01-000004-30-6
G	BRI Soreang		
2	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	(220)	
A	Bank Mandiri Asia Afrika Utara	(01P)	130-00-9300291-6
	Bank Mandiri Asia Afrika Utara (Devisa)	(01D)	130-00-9300295-7
B	Bank Mandiri Asia Afrika Selatan	(02P)	130-00-04220-64-9
C	Bank Mandiri Soekarno Hatta	(03P)	130-00-0408974-7
D	Bank Mandiri Bina Citra	(04P)	130-00-0408975-4
E	Bank Mandiri Siliwangi	(05P)	130-00-0409544-7
F	Bank Mandiri Alun-Alun	(06P)	130-00-0400109-8
G	Bank Mandiri Surapati	(07P)	131-00-0410778-7
H	Bank Mandiri Braga	(08P)	132-00-0407516-5
	Bank Mandiri Braga (Devisa)	(08D)	132-00-0407517-3
I	Bank Mandiri Padjajaran	(09P)	132-00-0400417-3

J	Bank Mandiri RSHS	(10P)	132-00-0400040-3
3	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Otista	(230)	00038431300
4	PT. Bank BCA, Tbk.	(240)	
A	Bank BCA Asia Afrika	(01P)	008.30.54031
B	Bank BCA Asia Afrika (Devisa)	(01D)	008.30.54023
C	Bank BCA Soekarno Hatta	(02P)	346.30.31301
D	Bank BCA Ahmad Yani	(03P)	437.31.11301
E	Bank BCA Dago	(04P)	777.07.03080
5	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.	(250)	
A	Bank CIMB Niaga Lembong	(01P)	224.01.00320.00.3
	Bank CIMB Niaga Lembong (Devisa)	(01D)	224.01.00321.00.9
6	PT. Bank UOB Buana, Tbk.	(260)	0040088410
7	PT. Bank Artha Graha, Tbk	(270)	0301235330
8	PT. Bank Resona Perdania, Tbk.	(280)	

A	Bank Resona Perdania	(01P)	0040-820409-360
	Bank Resona Perdania (Devisa)	(01D)	0040-820419-360
9	PT. Bank Bumi Artha, Tbk	(281)	200-19-77777
10	PT. Bank Ekonomi, Tbk.	(282)	601.925662.003
11	PT. Bank Mayapada, Tbk.	(283)	601-30-00444-2
12	PT. Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk.	(284)	1010021812
13	PT. Bank Commonwealth	(285)	
A	Bank Commonwealth	(01P)	1009187289
	Bank Commonwealth (Devisa)	(01D)	1009187390
14	PT. Bank Himpunan Saudara Cabang Wastukencana	(286)	1107000018

Tabel 2.2 Mitra kerja Perbankan

2.4 Kegiatan Instansi (KPPN Bandung I)

2.4.1 Aktivitas KPPN Bandung I

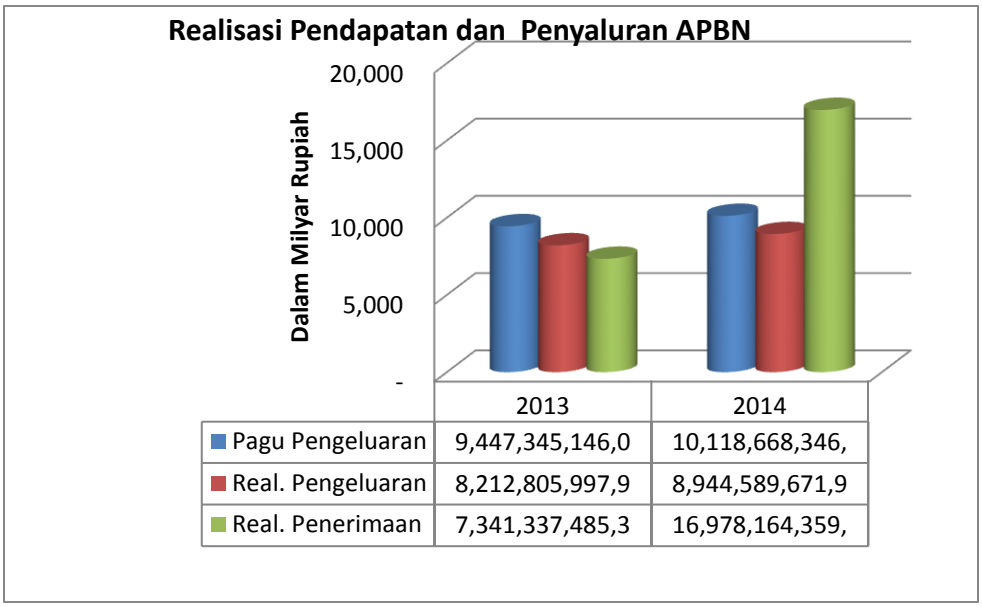
Aktivitas yang dijalankan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I meliputi:

1. Mengelola APBN
2. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi penerimaan baik pajak maupun nonpajak.
3. Mengeluarkan dana dalam rangka belanja negara dan pengolahan data serta penyajian informasi pengeluaran negara.

2.4.1.1 Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor133/PMK.05/2008 tentang Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kementrian Negara/Lembaga, saat ini pengelolaan belanja pegawai Kantor/Satuan Kerja non TNI/Polri telah diserahkan sepenuhnya kepada Kantor/Satuan Kerja masing-masing. Prosedur pengajuan SPM dan proses penerbitan SP2D dilakukan sebagai berikut:

a. SPM belanja pegawai (Gaji) beserta kelengkapannya diterima oleh petugas front office tanpa daftar Gaji, kecuali dari satuan kerja Polri.
b. Waktu penyelesaian SP2D belanja pegawai berpedoman pada PMK.190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



Gambar 2.4 Prosentasi Realisasi APBN

2.4.2 Visi dan Misi KPPN BANDUNG I

Adapun visi dan misi dari KPPN Bandung I adalah sebagai berikut :

a. Visi KPPN Bandung I

Menjadi pelaksana kuasa bendahara umum Negara di daerah yang professional, transparan, dan akuntabel.

b. Misi KPPN Bandung I

- Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan akuntabel
- Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel.

- Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu.
- Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal, profesional, dan modern.